



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 1 /DPR RI/II/2017-2018

**TENTANG
PROGRAM LEGISLASI NASIONAL RANCANGAN UNDANG-UNDANG
PRIORITAS TAHUN 2018 DAN PROGRAM LEGISLASI NASIONAL PERUBAHAN
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TAHUN 2015-2019**

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan *juncto* Pasal 65 huruf a dan huruf b Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 *juncto* Pasal 40 ayat (5) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyusunan Program Legislasi Nasional, perlu menetapkan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2018 dan Program Legislasi Nasional Perubahan Rancangan Undang-Undang Tahun 2015-2019;
- b. bahwa Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2015-2019 telah ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6A/DPR RI/II/2014-2015;
- c. bahwa Keputusan Rapat Koordinasi Badan Legislasi dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Panitia Perancang Undang-Undang Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia pada tanggal 20 November 2017 telah menyepakati Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2018 dan Program Legislasi Nasional Perubahan Rancangan Undang-Undang Tahun 2015-2019 untuk ditetapkan;
- d. bahwa penetapan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2018 dan Program Legislasi Nasional Perubahan Rancangan Undang-Undang Tahun 2015-2019 sebagaimana dimaksud pada huruf c ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);
 3. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1607), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1362);
 4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyusunan Program Legislasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1361).

Memperhatikan : Keputusan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ke-12 tanggal 5 Desember 2017;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG PROGRAM LEGISLASI NASIONAL RANCANGAN UNDANG-UNDANG PRIORITAS TAHUN 2018 DAN PROGRAM LEGISLASI NASIONAL PERUBAHAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG TAHUN 2015-2019.**

PERTAMA : Menetapkan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2018 dan Program Legislasi Nasional Perubahan Rancangan Undang-Undang Tahun 2015-2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

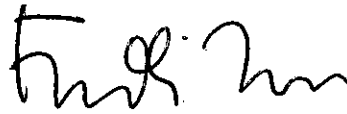
SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Pimpinan DPR RI;
2. Ketua DPD RI;
3. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;
4. Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional RI;

5. Ketua Komisi I sampai dengan Komisi XI DPR RI;
6. Para Ketua Badan Alat Kelengkapan DPR RI;
7. Para Ketua Fraksi : FPDI Perjuangan, FPG, FPD, FPKS, FPAN, FPPP, FPKB, F-PGERINDRA, FPN Demokrat dan F-PHANURA;
8. Kepala Badan Keahlian DPR RI;
9. Para Deputi dan Inspektorat Utama di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI;
10. Para Kepala Biro/Pusat di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 5 Desember 2017

WAKIL KETUA,



Dr. H. FADLI ZON, SS., M.Sc.

**DAFTAR PROGRAM LEGISLASI NASIONAL
RANCANGAN UNDANG-UNDANG PRIORITAS TAHUN 2018**

No.	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH
1.	RUU tentang Pertanahan.	DPR
2.	RUU tentang Jabatan Hakim.	DPR
3.	RUU tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan.	DPR
4.	RUU tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan. (dalam Prolegnas 2015-2019, tertulis: RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman).	DPR
5.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.	DPR
6.	RUU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.	DPR
7.	RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual.	DPR
8.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.	DPR
9.	RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. (dalam Prolegnas 2015-2019, tertulis: RUU tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPD).	DPR
10.	RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol.	DPR
11.	RUU tentang Pertembakauan.	DPR
12.	RUU tentang Kewirausahaan Nasional.	DPR
13.	RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (dalam Prolegnas 2015-2019, tertulis: RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya).	DPR

No.	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH
14.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.	DPR
15.	RUU tentang Radio Televisi Republik Indonesia.	DPR
16.	RUU tentang Sumber Daya Air.	DPR
17.	RUU tentang Badan Usaha Milik Negara.	DPR
18.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.	DPR
19.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.	DPR
20.	RUU tentang Praktik Pekerjaan Sosial.	DPR
21.	RUU tentang Kebidanan.	DPR
22.	RUU tentang Serah Simpan Karya Cetak, Karya Rekam, dan Karya Elektronik (dalam Prolegnas 2015-2019, tertulis: RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah-simpan Karya Cetak dan Karya Rekam).	DPR
23.	RUU tentang Perkelapasawitan.	DPR
24.	RUU tentang Masyarakat Adat (dalam Prolegnas 2015-2019, tertulis: RUU tentang Perlindungan dan Pengakuan Hak Masyarakat Adat).	DPR
25.	RUU tentang Peningkatan Pendapatan Asli Daerah.	DPR
26.	RUU tentang Lembaga Pendidikan Keagamaan dan Pesantren.	DPR
27.	RUU tentang Konsultan Pajak.	DPR
28.	RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.	DPR
29.	RUU tentang Penyadapan.	DPR
30.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran.	DPR
31.	RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan serta Pemanfaatan Obat Asli Indonesia.	DPR
32.	RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.	PEMERINTAH

No.	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH
33.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.	PEMERINTAH
34.	RUU tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.	PEMERINTAH
35.	RUU tentang Keekarantinaan Kesehatan.	PEMERINTAH
36.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.	PEMERINTAH
37.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.	PEMERINTAH
38.	RUU tentang Kepalangmerahan.	PEMERINTAH
39.	RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.	PEMERINTAH
40.	RUU tentang Bea Meterai.	PEMERINTAH
41.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.	PEMERINTAH
42.	RUU tentang Narkotika dan Psikotropika (dalam Prolegnas 2015-2019, tertulis: RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).	PEMERINTAH
43.	RUU tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (dalam Prolegnas 2015-2019, tertulis: RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah).	PEMERINTAH
44.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.	PEMERINTAH
45.	RUU tentang Pembatasan Transaksi Uang Kartal.	PEMERINTAH
46.	RUU tentang Landas Kontinen Indonesia (dalam Prolegnas 2015-2019, tertulis: RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia).	PEMERINTAH

No.	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH
47.	RUU tentang Desain Industri. (dalam Prolegnas 2015-2019, tertulis: RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri).	PEMERINTAH
48.	RUU tentang Ekonomi Kreatif.	DPD
49.	RUU tentang Wawasan Nusantara.	DPD
50.	RUU tentang Daerah Kepulauan (dalam Prolegnas 2015-2019, tertulis: RUU tentang Penyelenggaraan Pemerintahan di Wilayah Kepulauan).	DPD

DAFTAR RUU KUMULATIF TERBUKA	
1.	RUU Kumulatif Terbuka tentang Pengesahan Perjanjian Internasional.
2.	RUU Kumulatif Terbuka Akibat Putusan Mahkamah Konstitusi
3.	RUU Kumulatif Terbuka tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
4.	RUU Kumulatif Terbuka tentang Pembentukan, Pemekaran, dan Penggabungan Daerah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota.
5.	RUU Kumulatif Terbuka tentang Penetapan/Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.

WAKIL KETUA,


Dr. H. FADLI ZON, SS., M.Sc.

**PROGRAM LEGISLASI NASIONAL PERUBAHAN
 RANCANGAN UNDANG-UNDANG TAHUN 2015-2019**

NO.	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	NA & RUU DISIAPKAN OLEH	KETERANGAN
1	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.	DPR/PEMERINTAH	
2	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.	DPR/PEMERINTAH	
3	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).	DPR/PEMERINTAH	Sudah disahkan menjadi UU No : 19 Tahun 2016
4	RUU tentang Persandian.	DPR/PEMERINTAH	
5	RUU tentang Rahasia Negara.	DPR/PEMERINTAH	
6	RUU tentang Keamanan Nasional.	DPR/PEMERINTAH	
7	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.	DPR/PEMERINTAH	
8	RUU tentang Radio Televisi Republik Indonesia.	DPR/PEMERINTAH	
9	RUU tentang Konvergensi Telematika.	DPR/PEMERINTAH /DPD	
10	RUU tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Pertahanan Negara.	PEMERINTAH	
11	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.	PEMERINTAH	
12	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman.	DPR	

NO.	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	NA & RUU DISIAPKAN OLEH	KETERANGAN
13	RUU tentang Perlindungan Data dan Informasi Pribadi.	PEMERINTAH	
14	RUU tentang Wawasan Nusantara.	DPD	
15	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos.	PEMERINTAH	
16	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.	PEMERINTAH	
17	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah.	PEMERINTAH	
18	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.	DPR	Sudah disahkan menjadi UU No : 8 Tahun 2015
19	RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.	DPR	Sudah disahkan menjadi UU No : 9 Tahun 2015
20	RUU tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.	DPR/PEMERINTAH	Sudah disahkan menjadi UU No : 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
21	RUU tentang Pertanahan.	DPR	
22	RUU tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPD.	DPR/PEMERINTAH /DPD	
23	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.	DPR/PEMERINTAH /DPD	

NO.	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	NA & RUU DISIAPKAN OLEH	KETERANGAN
24	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara Serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara.	DPR/DPD	
25	RUU tentang Sistem Pengawasan Intern Pemerintah.	DPR/PEMERINTAH	
26	RUU tentang Pengelolaan Terpadu Kawasan Megapolitan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan Cianjur.	DPD	
27	RUU tentang Provinsi Bali.	DPD	
28	RUU tentang Etika Penyelenggara Negara/ RUU tentang Etika Lembaga Perwakilan.	DPR	
29	RUU tentang Partisipasi Masyarakat.	DPD	
30	RUU tentang Penyelenggaraan Pemerintah di Wilayah Kepulauan.	DPD	
31	RUU tentang Sistem Penyelesaian Konflik Agraria.	DPR	
32	RUU tentang Perkumpulan.	DPR/PEMERINTAH /DPD	
33	RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.	PEMERINTAH	
34	RUU tentang Hukum Acara Pidana.	DPR	
35	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.	DPR/PEMERINTAH	
36	RUU tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.	PEMERINTAH/DPD	
37	RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.	DPR/PEMERINTAH	

NO.	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	NA & RUU DISIAPKAN OLEH	KETERANGAN
38	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.	PEMERINTAH/DPD	
39	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI.	DPR/PEMERINTAH	
40	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.	DPR	
41	RUU tentang Hukum Acara Perdata.	PEMERINTAH	
42	RUU tentang Perlindungan dan Pengakuan Hak Masyarakat Adat.	DPR/DPD	
43	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.	DPR/PEMERINTAH	
44	RUU tentang Perampasan Aset Tindak Pidana.	PEMERINTAH	
45	RUU tentang Mahkamah Agung.	DPR	
46	RUU tentang Merek.	PEMERINTAH	Sudah menjadi UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
47	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.	PEMERINTAH	
48	RUU tentang Ekstradisi (mengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi).	PEMERINTAH	
49	RUU tentang Paten.	PEMERINTAH	Sudah disahkan menjadi UU No : 13 Tahun 2016
50	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana.	PEMERINTAH	

NO.	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	NA & RUU DISIAPKAN OLEH	KETERANGAN
51	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.	DPR	
52	RUU tentang Jabatan Hakim.	DPR	
53	RUU tentang Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma dan Persekutuan Komanditer.	PEMERINTAH	
54	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.	PEMERINTAH	
55	RUU tentang Pemandangan Narapidana antar Negara.	PEMERINTAH	
56	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.	PEMERINTAH	
57	RUU tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.	PEMERINTAH	
58	RUU tentang Balai Harta Peninggalan.	PEMERINTAH	
59	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.	DPR	
60	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.	PEMERINTAH	
61	RUU tentang Penghinaan Dalam Persidangan (<i>Contempt of Court</i>).	DPR	
62	RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.	DPR	
63	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.	DPR	
64	RUU tentang Pelestarian dan Pemanfaatan Sumber Daya Genetik.	DPR/PEMERINTAH /DPD	

NO.	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	NA & RUU DISIAPKAN OLEH	KETERANGAN
65	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya alam Hayati dan Ekosistemnya.	DPR/PEMERINTAH	
66	RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.	DPR/DPD	
67	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia.	DPR/PEMERINTAH	
68	RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.	DPR/PEMERINTAH	
69	RUU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam.	DPR	Sudah disahkan menjadi UU No : 7 Tahun 2016
70	RUU tentang Zona Tambahan Indonesia.	PEMERINTAH	
71	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman.	DPR/DPD	
72	RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.	DPR/PEMERINTAH	
73	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman.	DPR/DPD	
74	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan.	DPR	
75	RUU tentang Kedaulatan Pangan.	DPR	
76	RUU tentang Jalan.	DPR/DPD	

NO.	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	NA & RUU DISIAPKAN OLEH	KETERANGAN
77	RUU tentang Tabungan Perumahan Rakyat.	DPR	Sudah disahkan menjadi UU No : 4 Tahun 2016
78	RUU tentang Jasa Konstruksi.	DPR	Sudah disahkan menjadi UU No : 2 Tahun 2017
79	RUU tentang Arsitek.	DPR	Sudah disahkan menjadi UU No : 6 Tahun 2017
80	RUU tentang Sistem Transportasi Nasional.	DPR	
81	RUU tentang Pengembangan Pembangunan Daerah Kepulauan.	DPR	
82	RUU tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal.	DPR	
83	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN.	DPR/PEMERINTAH	
84	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.	DPR/DPD	
85	RUU tentang Perkoperasian.	DPR/PEMERINTAH /DPD	
86	RUU tentang Pertembakauan.	DPR	
87	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.	DPR	
88	RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol.	DPR	
89	RUU tentang Bahan Kimia.	PEMERINTAH	
90	RUU tentang Metrologi Legal.	PEMERINTAH	
91	RUU tentang Badan Usaha Milik Daerah.	DPD	

NO.	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	NA & RUU DISIAPKAN OLEH	KETERANGAN
92	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.	PEMERINTAH	
93	RUU tentang Ekonomi Kreatif.	DPD	
94	RUU tentang Kewirausahaan Nasional.	DPR	
95	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.	DPR/PEMERINTAH	
96	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.	DPR/PEMERINTAH	
97	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan.	DPR/PEMERINTAH	
98	RUU tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam.	DPR	
99	RUU tentang Geologi.	DPR/DPD	
100	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2001 tentang Energi.	DPR	
101	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.	DPR	
102	RUU tentang Keadilan dan Kesetaraan Gender.	DPR/PEMERINTAH /DPD	
103	RUU tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.	DPR	
104	RUU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.	DPR	

NO.	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	NA & RUU DISIAPKAN OLEH	KETERANGAN
105	RUU tentang Penyandang Disabilitas.	DPR	Sudah disahkan menjadi UU No : 8 Tahun 2016
106	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.	DPR/DPD	
107	RUU tentang Kepalaangmerahan.	DPR	
108	RUU tentang Praktik Pekerjaan Sosial.	DPR	
109	RUU tentang Lembaga Pendidikan Keagamaan.	DPR	
110	RUU tentang Ketahanan Keluarga.	DPR	
111	RUU tentang Perlindungan Umat Beragama.	DPR/PEMERINTAH	
112	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.	PEMERINTAH	
113	RUU tentang Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri.	DPR	Sudah disahkan pada Rapur Tgl 25 Oktober 2017, Menunggu penomoran oleh Setneg.
114	RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.	DPR	
115	RUU tentang Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga.	DPR/DPD	
116	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.	DPR	
117	RUU tentang Kebidanan.	DPR/DPD	

NO.	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	NA & RUU DISIAPKAN OLEH	KETERANGAN
118	RUU tentang Keekarantinaan Kesehatan.	PEMERINTAH	
119	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.	DPR	
120	RUU tentang Praktik Kefarmasian.	DPR	
121	RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan serta Pemanfaatan Obat Asli Indonesia.	DPR	
122	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular.	PEMERINTAH	
123	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.	PEMERINTAH	
124	RUU tentang Pengawasan Ketenagakerjaan.	DPR/PEMERINTAH	
125	RUU tentang Sistem Pengupahan.	DPR/PEMERINTAH	
126	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.	DPR/PEMERINTAH /DPD	
127	RUU tentang Kebudayaan.	DPR	Sudah disahkan menjadi UU No : 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan
128	RUU tentang Bahasa dan Kesenian Daerah.	DPD	
129	RUU tentang Sistem Perbukuan.	DPR	Sudah disahkan menjadi UU No : 3 Tahun 2017
130	RUU tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.	DPR/DPD	

NO.	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	NA & RUU DISIAPKAN OLEH	KETERANGAN
131	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah-simpan Karya Cetak dan Karya Rekam.	DPR	
132	RUU tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.	DPR/PEMERINTAH /DPD	
133	RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia.	DPR/PEMERINTAH	
134	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.	DPR/PEMERINTAH	
135	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.	DPR/PEMERINTAH	
136	RUU tentang Pengurusan Piutang Negara dan Piutang Daerah.	DPR/PEMERINTAH	
137	RUU tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan.	PEMERINTAH	Sudah disahkan menjadi UU No : 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan
138	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.	DPR/DPD	
139	RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.	DPR	
140	RUU tentang Pembatasan Transaksi Penggunaan Uang Kartal.	PEMERINTAH	
141	RUU tentang Pajak Penghasilan.	PEMERINTAH/DPD	
142	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.	PEMERINTAH/DPD	
143	RUU tentang Pengelolaan Kekayaan	PEMERINTAH/DPD	

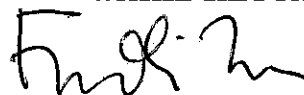
NO.	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	NA & RUU DISIAPKAN OLEH	KETERANGAN
	Negara.		
144	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar.	DPR	
145	RUU tentang Perubahan Harga Rupiah.	PEMERINTAH	
146	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun.	PEMERINTAH	
147	RUU tentang Lelang.	PEMERINTAH	
148	RUU tentang Penjaminan.	DPR	Sudah disahkan menjadi UU No : 1 Tahun 2016
149	RUU tentang Penjaminan Polis.	PEMERINTAH	
150	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.	PEMERINTAH	
151	RUU tentang Penilai.	PEMERINTAH	
152	RUU tentang Pengadaan Barang dan Jasa.	DPD	
153	RUU tentang Perekonomian Nasional.	DPR/DPD	
154	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.	PEMERINTAH	
155	RUU tentang Lembaga Pembiayaan Pembangunan Indonesia.	PEMERINTAH	
156	RUU tentang Bea Materai.	PEMERINTAH	
157	RUU tentang Pajak Bumi dan Bangunan.	PEMERINTAH	

NO.	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	NA & RUU DISIAPKAN OLEH	KETERANGAN
158	RUU tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah.	PEMERINTAH	
159	RUU tentang Peningkatan Pendapatan Asli Daerah.	DPR	
160	RUU tentang Tabungan Haji.	DPR	
161	RUU tentang Pengampunan pajak.	PEMERINTAH	Sudah disahkan menjadi UU No : 11 Tahun 2016
162	RUU tentang Perkelapasawitan.	DPR	
163	RUU tentang Kedaulatan Sandang Nasional/RUU tentang Pertekstilan.	DPR	
164	RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.	PEMERINTAH	
165	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.	PEMERINTAH	
166	RUU tentang Keamanan Laut.	DPR	
167	RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual.	DPR	
168	RUU tentang Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.	DPR	
169	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan	DPR	
170	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.	DPR	
171	RUU tentang Konsultan Pajak.	DPR	
172	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran.	DPR	

NO.	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	NA & RUU DISIAPKAN OLEH	KETERANGAN
173	RUU tentang Ketenaganukliran.	PEMERINTAH	
174	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.	PEMERINTAH	
175	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup.	DPD	
176	RUU Tentang Pengelolaan Kawasan Perbatasan Negara.	DPD	
177	RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.	DPR	
178	RUU tentang Sanitasi.	DPR	
179	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.	DPR	
180	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.	DPR	
181	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.	DPR	
182	RUU tentang Sistem Pelaporan, Pendaftaran, Pemeriksaan dan Penentuan Status Hukum Gratifikasi dan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.	DPR	
183	RUU tentang Permusikan.	DPR	
184	RUU tentang Perlindungan dan Pengakuan Hak Masyarakat Adat.	DPD	
185	RUU tentang Penyadapan.	DPR	

DAFTAR RUU KUMULATIF TERBUKA

1.	RUU Kumulatif Terbuka tentang Pengesahan Perjanjian Internasional.
2.	RUU Kumulatif Terbuka Akibat Putusan Mahkamah Konstitusi
3.	RUU Kumulatif Terbuka tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
4.	RUU Kumulatif Terbuka tentang Pembentukan, Pemekaran, dan Penggabungan Daerah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota.
5.	RUU Kumulatif Terbuka tentang Penetapan/Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.

WAKIL KETUA,**Dr. H. FADLI ZON, SS., M.Sc./**